AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68509

The Implementation of Micro and Small Enterprise Empowerment Policies Through Digitalization in North Sumatra, Indonesia

P. H. Elisabet Hutasoit[1*], Audia Junita[2], Warijo[3]
[1]*E-mail : elisabethutasoit78@gmail.com*
[2]*E-mail : elisabethutasoit78@gmail.com*
[3]*E-mail : perubahanpolitik@gmail.com*
[1,2,3]*Universitas Medan Area, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 28 April 2026
Acceptance date: 26 May 2026
Available online: 31 May 2026

Keywords:
Policy Implementation; MSME Empowerment; Digitalization; North Sumatra.

How to Cite:
Hutasoit, P. H. E., Junita, A., & Warijo. (2026). The Implementation of Micro and Small Enterprise Empowerment Policies Through Digitalization in North Sumatra, Indonesia. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.68509

License:
Copyright (c) The authors (2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

Technological developments in the modern era certainly have a significant impact on every activity or activity of society. This study will explain how the development of modernization of micro and small business activities by utilizing digitalization in their productivity in the North Sumatra region. Of course, it cannot be separated from the local government through the Cooperatives and SMEs Office which has implemented various programs to improve SMEs in utilizing digitalization for SME activities. However, there are still obstacles to the digitalization of SMEs, including human resources that are not ready to utilize it, capital to have digitalization, and coordination between agencies. This study aims to analyze how the process of implementing the Micro and Small Business empowerment program through digitalization in North Sumatra. By using a descriptive qualitative approach method, and applying the Van Meter and Van Horn policy implementation model as an analytical tool, which includes variables of policy size, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, communication between organizations, and social, economic, and political conditions. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using interactive analysis techniques of Miles and Huberman. The findings of this study indicate that, despite government commitments through relevant agencies, many MSMEs in North Sumatra are still hampered and suboptimal due to deliberate deficiencies in human resource readiness and infrastructure support.

INTRODUCTION

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor paling strategis dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65,4 juta unit usaha yang berkontribusi sekitar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi ini menunjukkan peran vital UMKM dalam menggerakkan perekonomian, terutama pada masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. UMKM terbukti menjadi sektor yang paling adaptif, meskipun banyak yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal modal, akses pasar, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan dan penguatan sektor UMKM menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Salah satu isu krusial dalam pengembangan UMKM adalah transformasi digital. Di era Revolusi Industri 4.0, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan agar UMKM mampu meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga telah menggulirkan sejumlah program seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), program onboarding UMKM ke platform e-commerce, dan pelatihan literasi digital. Program ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, maupun layanan pelanggan. Namun, di lapangan implementasi kebijakan digitalisasi masih menghadapi tantangan serius. Tidak semua pelaku UMKM memiliki kesiapan untuk mengadopsi teknologi digital, terutama mereka yang berada di wilayah dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih memiliki pola pikir tradisional, lebih percaya pada metode konvensional, dan kurang memiliki keterampilan digital.[1]

Di Provinsi Sumatera Utara, jumlah UMK diperkirakan mencapai lebih dari 2,6 juta unit usaha (BPS Sumut, 2023). Sebagian besar UMK bergerak pada sektor perdagangan, kuliner, pertanian, dan industri kreatif. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara telah meluncurkan program Go Digital UMK, pelatihan literasi digital, serta menjalin kerja sama dengan marketplace nasional maupun lokal. Salah satu studi kasus yang menarik adalah program pendampingan digitalisasi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Di Medan, banyak UMK yang bergerak di sektor kuliner berhasil meningkatkan penjualan melalui platform daring setelah mengikuti pelatihan digital marketing yang diselenggarakan pemerintah daerah bekerja sama dengan

[1] Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan Publik. Alfabeta

penyedia marketplace. Sementara itu, di Kabupaten Deli Serdang, pemerintah menghadapi kendala berupa keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi teknologi. Hal ini menyebabkan adopsi digitalisasi di wilayah pedesaan berjalan lebih lambat dibandingkan di perkotaan.[2]

Selain itu, peran lembaga keuangan dan BUMN/BUMD juga sangat penting dalam mendorong digitalisasi UMK. Program kerja sama dengan bank daerah dalam penyediaan akses pembiayaan digital serta penggunaan aplikasi keuangan berbasis daring menjadi salah satu inovasi yang diperkenalkan. Namun, masih banyak UMK yang mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena keterbatasan agunan dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur perbankan. Hambatan ini semakin memperkuat kesenjangan antara UMK yang sudah melek digital dengan mereka yang masih bertahan dalam pola usaha tradisional.

Kesenjangan implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan digitalisasi telah dirancang dengan baik, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala. Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini. Keenam variabel dalam model tersebut standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, dan sikap pelaksana—akan membantu dalam memahami bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan, faktor apa saja yang mendukung, serta hambatan yang harus diatasi.[3]

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi program pemberdayaan UMK melalui digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara. Selain memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, dalam merancang strategi pemberdayaan UMK yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital.[4]

[2] Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
[3] Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publications.
[4] Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif–studi kasus untuk memahami bagaimana kebijakan pemberdayaan dan digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diimplementasikan pada level pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menafsirkan proses, aktor, serta dinamika antarorganisasi, bukan menguji hipotesis kausal. Kerangka analitik merujuk model implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn yang memeriksa enam kelompok variabel kunci dalam keberlaksanaan kebijakan—standar/sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial–ekonomi–politik.[5] Dalam tradisi penelitian kualitatif, desain ini memungkinkan peneliti menangkap makna dan praktik implementasi sebagaimana dipersepsi para pelaksana dan penerima manfaat kebijakan.[6] Studi dilakukan dalam ekosistem Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara (Diskop UKM Sumut) beserta jejaring mitranya (pendamping, lembaga keuangan, dan platform digital), serta pada UMK binaan yang menerima layanan pelatihan/pendampingan digitalisasi.[7] Pemilihan konteks ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebijakan digitalisasi UMK di daerah tersebut berjalan secara aktif dan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga relevan untuk menelaah aspek koordinasi lintas-aktor, ketersediaan sumber daya, dan pencapaian sasaran kebijakan. Informan ditentukan secara purposive untuk menangkap variasi peran dan pengetahuan yang relevan dengan implementasi. Kategori informan meliputi: (1) pejabat dan/atau staf teknis pada Diskop UKM; (2) pendamping/tenaga teknis program; (3) mitra pelaksana (misalnya perbankan/penyedia platform); dan (4) pelaku UMK penerima layanan. Apabila diperlukan, teknik snowball digunakan untuk menjangkau informan yang mengetahui detail proses tertentu. Jumlah informan tidak ditetapkan sejak awal secara kaku, namun mengikuti prinsip saturasi data penggalian dihentikan ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan tema atau informasi baru yang bermakna. Seluruh informan diberi kode anonim (misal, P1–P5 untuk pelaksana; U1–U10 untuk pelaku UMK) demi menjaga kerahasiaan.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman yang memetakan pertanyaan ke enam variabel model

[5] Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
[6] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE.
[7] Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? Field Methods, 18(1), 59–82.

implementasi. Wawancara dilakukan tatap muka/daring, direkam atas persetujuan, dan disertai catatan lapangan. Kedua, observasi non-partisipan terhadap kegiatan kunci (misalnya pelatihan, klinik konsultasi, atau pendampingan on-boarding digital) untuk menangkap praktik nyata, alur kerja, serta interaksi lintas-aktor. Ketiga, studi dokumen meliputi regulasi, rencana kerja, petunjuk teknis, laporan pelaksanaan, notula rapat koordinasi, dan materi sosialisasi/program. Triangulasi antar-teknik dilakukan untuk memeriksa konsistensi temuan.

Analisis mengikuti kerangka Miles, Huberman, & Saldaña: kondensasi data (open/axial coding), penyajian data (matriks/jejaring tema), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan secara iteratif.[8] Proses pengodean menggabungkan pendekatan deduktif mengacu pada enam variabel model dengan induktif untuk membuka tema baru yang muncul dari lapangan. Untuk menata korpus dan jejak audit, peneliti menggunakan perangkat lunak bantu analisis kualitatif atau lembar kerja terstruktur. Kesimpulan diverifikasi melalui pengecekan berulang ke data mentah, diskusi sejawat, dan pembandingan antar-sumber. Keandalan temuan dijaga dengan menerapkan empat pilar trustworthiness: credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Strategi yang digunakan meliputi: (a) triangulasi sumber, metode, dan peneliti; (b) member checking terhadap ringkasan temuan; (c) thick description atas konteks dan proses; (d) audit trail melalui dokumentasi lengkap proses pengumpulan–analisis; serta (e) refleksivitas peneliti terhadap posisi dan potensi bias. Pendekatan ini memastikan temuan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.[9]

RESULT AND DISCUSSIONS

1. Implementasi Program Pemberdayaan UMK melalui Digitalisasi

Implementasi program pemberdayaan UMK melalui digitalisasi di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi dan variasi geografis daerah. Pembahasan ini memperluas uraian dengan menambahkan studi kasus empiris di beberapa wilayah serta menguraikan dinamika kebijakan yang berlangsung. Analisis terparafrase ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga pengalaman nyata pelaku dan pelaksana program di lapangan.

[8] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE.
[9] Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). SAGE.

a. Perumusan Tujuan dan Target Operasional

Program digitalisasi di Sumut dirancang untuk memperluas akses pasar UMK melalui e-commerce, mendorong adopsi pembayaran digital, dan memperkuat literasi teknologi. Target operasional diturunkan ke dalam sasaran tahunan, misalnya jumlah UMK yang onboarding ke marketplace nasional. Studi kasus di Kota Medan menunjukkan capaian onboarding yang cukup tinggi karena dukungan infrastruktur internet yang memadai, sedangkan di Kabupaten Langkat target belum tercapai karena masih banyak wilayah dengan akses jaringan terbatas.[10]

b. Desain Intervensi dan Modul Layanan

Desain intervensi berbentuk pelatihan literasi digital, workshop pembuatan katalog online, hingga pendampingan manajemen transaksi daring. Di Kota Medan, program 'Go Digital Medan' memperkenalkan UMK pada pemasaran berbasis Instagram dan Shopee. Sebaliknya, studi kasus di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan pelatihan masih berfokus pada literasi dasar seperti cara menggunakan aplikasi pesan singkat untuk promosi produk. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi strategi sesuai dengan kesiapan pelaku.

c. Peran Aktor dan Koordinasi

Implementasi melibatkan Dinas Koperasi & UKM sebagai koordinator, didukung oleh mitra marketplace, bank daerah, serta BUMN. Di Kota Pematangsiantar, kerja sama dengan Bank Sumut memungkinkan integrasi rekening UMK dengan aplikasi pembayaran digital. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keterlibatan sektor keuangan menjadi kunci untuk mempercepat transformasi, meski di beberapa daerah lain belum semua bank lokal memiliki kapasitas layanan digital.

d. Mobilisasi Sumber Daya

Sumber daya pendamping masih terbatas, sehingga beberapa kabupaten hanya memiliki satu hingga dua fasilitator digital. Kasus di Tapanuli Utara memperlihatkan keterbatasan jumlah pendamping mengakibatkan pelatihan hanya dapat menjangkau sebagian kecil UMK binaan. Untuk mengatasi ini, Pemprov Sumut menggandeng komunitas digital lokal untuk memperluas jangkauan. Dari sisi anggaran, dana masih diprioritaskan untuk pelatihan dasar, sementara dukungan bagi UMK yang sudah lebih maju masih terbatas.[11]

[10] Nugroho, R. (2004). Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.
[11] Suhendra. (2006). Manajemen pemberdayaan masyarakat. LP3ES.

e. Strategi Pendampingan

Strategi pendampingan dilakukan secara berjenjang. Di Kota Binjai, program klinik digital dilaksanakan mingguan di balai kota dengan materi spesifik sesuai kebutuhan sektor usaha. Studi kasus ini menunjukkan bahwa pendampingan yang rutin dan berkelanjutan lebih efektif dibandingkan pelatihan sekali jalan. Sementara itu, di Kabupaten Humbang Hasundutan, pendampingan dilakukan dengan model 'mobile clinic' karena keterbatasan akses transportasi dan internet, sehingga pelatihan digilir antar desa.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Hasil Awal

Monitoring dilakukan melalui laporan progres onboarding dan evaluasi transaksi digital. Di Kota Medan, data menunjukkan peningkatan transaksi digital sebesar 25% dalam enam bulan pertama setelah program. Sebaliknya, studi kasus di Kabupaten Serdang Bedagai memperlihatkan bahwa meski UMK telah onboarding, aktivitas transaksi masih rendah karena keterbatasan stok produk dan rendahnya kepercayaan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi, tetapi juga kesiapan rantai pasok dan kualitas produk.[12]

g. Tantangan dan Solusi

Bagian ini memetakan hambatan utama dan solusi operasional dalam implementasi digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan mengacu pada enam variabel Model Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn. Rekomendasi difokuskan pada langkah yang realistis untuk ekosistem Provinsi Sumatera Utara (Sumut), seraya merujuk bukti dan praktik terkini di Indonesia.

1) Standar dan Saran Kebijakan

Tantangan: indikator kinerja sering belum seragam, baseline tidak terdokumentasi, dan target digitalisasi kurang diturunkan hingga level kabupaten/kota. Di sisi lain, indikator nasional seperti jumlah merchant/pengguna QRIS dan profil Industri Mikro Kecil (IMK) sudah tersedia tetapi belum selalu diintegrasikan sebagai acuan wilayah. Solusinya ialah tetapkan paket KPI lintas-instansi yang konsisten misalnya persentase UMK yang on-boarding digital, merchant QRIS aktif, intensitas transaksi, dan tingkat literasi/inklusi keuangan. Lengkapi dengan dashboard terintegrasi yang menarik data dari sumber resmi (BI untuk QRIS; BPS untuk IMK; OJK untuk literasi/inklusi).[13]

[12] Nugroho, R. (2004). Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.

[13] ANTARA Sumut. (2025, 27 Februari). 20 persen pelaku UMKM di Sumut sudah gunakan transaksi digital.

Turunkan target per kabupaten/kota dan lakukan peninjauan triwulanan untuk koreksi strategi.[14]

2) Sumber Daya

Tantangan: kesenjangan literasi digital & keuangan masih nyata; banyak UMK kekurangan keterampilan pemasaran digital, keamanan siber dasar, serta akses pembiayaan untuk adopsi teknologi. Kekurangan talenta digital di level pendamping juga membatasi skala pendampingan.Solusinya bangun skema pelatihan berjenjang (basic–intermediate–advanced) dengan kurikulum yang memadukan keterampilan pemasaran digital, pembukuan berbasis aplikasi, pembayaran nontunai/QRIS, dan hygiene keamanan siber. Terapkan model Training of Trainers (ToT) untuk pendamping. Sediakan skema pembiayaan mikro khusus investasi digital serta insentif bagi UMK yang memenuhi milestone (mis. go live toko daring, rasio transaksi nontunai, atau partisipasi e-procurement seperti PaDi UMKM).[15]

3) Komunikasi Antar Organisasi

Tantangan: koordinasi lintas instansi/lembaga dan mitra swasta masih silo; data penerima manfaat, status pelatihan, dan capaian adopsi sering tersebar di banyak sistem sehingga sulit ditindaklanjuti.Solusinya ialah bentuk gugus tugas data UMK lintas-instansi dengan skema berbagi data dan standar metadata sederhana (identitas usaha, status pelatihan, kanal pemasaran, status QRIS, pembiayaan). Tetapkan satu repositori 'single source of truth' dengan akses peran. Perkuat kalender bersama untuk event literasi keuangan/digital agar narasi dan materi terkoordinasi.[16]

4) Karakteristik Karakter Pelaksana

Tantangan: SOP layanan sering belum mendukung alur end-to-end (pendaftaran–pelatihan–onboarding monitoring). Kapasitas manajemen program dan perancangan layanan (service design) belum merata di unit pelaksana. Solusinya ialah rancang ulang alur layanan menjadi satu pintu (single window) dengan waktu layanan terstandar. Gunakan janji layanan (service level) yang terukur mis. waktu maksimal aktivasi kanal pembayaran digital setelah pelatihan. Terapkan kanvas proses (process canvas) dan SOP lintas mitra, serta audit mutu triwulanan.

5) Disposisi Pelaksana

Tantangan: variasi komitmen pelaksana dan pelaku UMK terhadap digitalisasi; sebagian pelaku ragu karena ketidakpastian manfaat jangka pendek atau kekhawatiran

[14] S Asian Development Bank (ADB). (2024). Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2024.
[15] OECD. (n.d.). Digitalisation of SMEs (tema).
[16] CyberPeace Institute. (2024). From Vulnerability to Resilience: Cybersecurity Challenges for MSMEs in APAC.

biaya/keamanan. Solusinya padukan insentif dan pengakuan contoh, pengurangan biaya layanan, voucher logistik, atau akses ke pameran/kurasi bagi UMK yang memenuhi indikator adopsi. Gunakan kampanye publik dan showcase seperti festival literasi keuangan/digital untuk menampilkan keberhasilan dan memperkuat kepercayaan.[17]

6) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Tantangan: kesenjangan infrastruktur (terutama luar kota), biaya logistik yang relatif tinggi bagi pelaku niaga daring, serta peningkatan risiko siber dan kewajiban kepatuhan privasi data. Ketidakselarasan regulasi dan dinamika pasar juga dapat memengaruhi keberlanjutan adopsi. Solusinya sinergikan program perluasan jaringan dan literasi digital dengan agenda promosi pembayaran nontunai (mis. QRIS), dorong kolaborasi dengan operator/logistik untuk paket ongkir UMK, dan terapkan protokol keamanan siber sederhana (autentikasi dua faktor, backup rutin, pembaruan perangkat). Pandu pelaku menerapkan langkah kepatuhan bertahap terhadap Pelindungan Data Pribadi (PDP)—inventarisasi data, kebijakan privasi, persetujuan yang jelas, dan prosedur penanganan insiden.[18]

Sintesis ini menjahit temuan dan pembahasan sebelumnya ke dalam kerangka teori implementasi kebijakan klasik. Fokusnya adalah bagaimana standar dan sasaran, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, serta konteks sosial–ekonomi–politik berinteraksi dan memengaruhi hasil program digitalisasi UMK. Dengan sudut pandang ini, implementasi dipahami sebagai proses adaptif yang memerlukan kombinasi arahan dari atas (top-down) dan umpan balik dari bawah (bottom-up).[19]

Literatur awal menekankan bahwa keberhasilan tidak semata ditentukan oleh kejelasan kebijakan di pusat, melainkan juga oleh banyaknya mata rantai keputusan di lapangan. Kompleksitas koordinasi dan ketergantungan antar-aktor membuat desain yang baik sekalipun dapat tersendat. Di sisi lain, diskresi petugas garis depan sering kali menerjemahkan kebijakan menjadi praktik yang berbeda antar-lokasi. Sintesis praktisnya: tetapkan tujuan yang jelas dan terukur di hulu, namun berikan ruang adaptasi prosedur di hilir dengan akuntabilitas yang memadai.[20]

Secara konseptual, implementasi yang efektif ditopang oleh: (a) tujuan yang jelas dan dapat dioperasionalkan; (b) teori kausal yang masuk akal tentang bagaimana instrumen

[17] Analisadaily. (2025, 16 Agustus). Medan Digifest 2025 padukan literasi keuangan digital.
[18] Tenggara Strategics. (2024). Tinjauan Strategis Logistik Darat di Indonesia.
[19] Bardach, E. (1977). The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law. MIT Press.
[20] Dunn, W. N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice-Hall.

menghasilkan perubahan; (c) struktur pelaksana dan mekanisme koordinasi yang memadai; (d) komitmen pelaksana serta dukungan politik; dan (e) konteks sosial-ekonomi yang kondusif. Bagi digitalisasi UMK, ini bermakna: indikator kinerja yang tersusun berjenjang, pemilihan instrumen yang sesuai (pelatihan, insentif adopsi, pembayaran nontunai/QRIS, dukungan logistik), struktur layanan satu pintu, serta dukungan kepemimpinan daerah dan kesiapan infrastruktur.

Pendekatan pemetaan mundur (backward mapping) mengawali perancangan dari hasil yang diinginkan—misalnya, UMK aktif bertransaksi digital—lalu menelusuri mundur langkah, prasyarat, dan aktor yang perlu diubah. Dengan cara ini, setiap intervensi diuji terhadap kebutuhan nyata di hilir (titik layanan dan pelaku usaha). Penerapan praktisnya adalah siklus pembelajaran cepat: uji coba terarah, umpan balik berbasis data, dan penyempurnaan berkala atas SOP, materi pelatihan, serta skema insentif.[21]

Menggabungkan pandangan di atas, strategi implementasi digitalisasi UMK memerlukan keseimbangan antara kontrol, koordinasi, dan kreativitas lokal. Lima prinsip operasional disarankan: (1) tujuan bertahap yang terukur (onboarding, aktivitas transaksi, literasi keuangan); (2) arsitektur koordinasi dan data bersama agar semua aktor mengacu pada 'satu sumber kebenaran'; (3) penguatan kapasitas pendamping dan diskresi terarah bagi petugas garis depan; (4) umpan balik cepat dari pelaku UMK untuk menilai kegunaan program; dan (5) konsistensi dukungan politik-anggaran agar skala program tetap terjaga.[22]

Konsep Klasik	**Inti Gagasan**	**Aksi Implementasi (UMK Digital)**
Rantai keputusan & koordinasi	Semakin panjang mata rantai, makin tinggi risiko deviasi	Sederhanakan alur layanan & kurangi titik serah; tetapkan SLA
Diskresi street-level	Petugas garis depan membentuk kebijakan melalui praktik harian	Berikan panduan & ruang adaptasi lokal + akuntabilitas output
Empat faktor Edwards	Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi	Standarisasi pesan, pelatihan & dukungan alat, insentif, SOP

[21] Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

[22] Elmore, R. F. (1979/1980). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601–616.

Kondisi Sabatier–Mazmanian	Kejelasan tujuan, teori kausal, dukungan politik, konteks	KPI berlapis, paket instrumen, komitmen pimpinan, peta infrastruktur
Backward mapping	Rancang dari hasil akhir ke hulu	Definisikan hasil (UMK aktif) → langkah → peran → kebijakan
Permainan implementasi	Aktor, strategi, sumber daya, dan aturan membentuk hasil	Petakan aktor-strategi; kurangi 'bottleneck' melalui insentif & aturan jelas

Dalam konteks provinsi, sintesis ini menyarankan penguatan peran koordinator program digitalisasi, pengelolaan data lintas-instansi, dan pelibatan komunitas UMK sebagai sumber umpan balik. Strategi ini menjaga konsistensi arah (top-down) sekaligus responsivitas lapangan (bottom-up). Sintesis ini bertumpu pada kerangka klasik yang kuat, namun tetap memerlukan pembaruan bukti lokal secara periodik mengingat dinamika teknologi dan pasar.[23] Studi lanjutan dapat menilai efektivitas kombinasi instrumen (pelatihan, insentif, e-payment, logistik) dalam meningkatkan keberlanjutan adopsi digital oleh UMK.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi program pemberdayaan UMK melalui digitalisasi di Sumatera Utara ditentukan oleh beragam faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat berperan sebagai pendorong keberhasilan maupun penghambat yang memperlambat capaian. Pembahasan ini memperluas analisis dengan menyoroti dimensi kebijakan, sosial, ekonomi, serta teknologi, disertai studi kasus dari berbagai wilayah.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendorong implementasi program antara lain:

a. Dukungan politik dan regulasi daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memasukkan digitalisasi UMK sebagai salah satu prioritas. Hal ini memberikan legitimasi kebijakan dan memastikan ketersediaan anggaran.[24]

[23] Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.
[24] Wahab, S. A. (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara.

b. Kolaborasi lintas sektor. Di Kota Medan, kerja sama Dinas Koperasi dengan marketplace nasional seperti Tokopedia dan Shopee mempercepat onboarding ribuan UMK. Kolaborasi dengan Bank Sumut juga mempermudah akses pembayaran digital dan fasilitas kredit mikro berbasis digital.
c. Antusiasme pelaku usaha. Di Kabupaten Deli Serdang, UMK kuliner menunjukkan semangat tinggi mengikuti pelatihan digital marketing. Studi kasus menunjukkan beberapa pelaku berhasil meningkatkan penjualan hingga 30% setelah memanfaatkan platform pesan antar makanan.
d. Peran komunitas lokal. Komunitas wirausaha muda di Pematangsiantar secara mandiri mengadakan kelas daring berbagi strategi pemasaran digital. Kehadiran komunitas memperkuat efek program formal dengan menciptakan ekosistem belajar yang berkelanjutan.
e. Dukungan teknologi. Di Kota Medan dan Binjai, infrastruktur jaringan 4G yang relatif stabil mendorong pelaku usaha lebih cepat mengadopsi aplikasi e-commerce. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor teknis sangat menentukan kesuksesan implementasi.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan program:

a. Keterbatasan infrastruktur digital. Di Kabupaten Langkat dan Mandailing Natal, sinyal internet masih tidak stabil, sehingga pelaku usaha sulit mengikuti pelatihan daring atau mengelola toko online.
b. Rendahnya literasi digital. Studi kasus di Humbang Hasundutan memperlihatkan banyak UMK kesulitan mengoperasikan aplikasi marketplace, membuat katalog produk, atau melakukan promosi berbasis konten digital.
c. Keterbatasan sumber daya manusia pelaksana. Jumlah fasilitator digital masih minim. Di Tapanuli Utara, hanya ada segelintir pendamping untuk melayani ratusan UMK, menyebabkan pendampingan tidak merata.
d. Keterbatasan modal dan perangkat. Banyak UMK belum memiliki smartphone memadai atau kamera berkualitas untuk membuat katalog produk. Kasus ini terlihat di Serdang Bedagai, di mana sebagian besar pelaku usaha masih meminjam perangkat dari kerabat.
e. Resistensi budaya. Di Mandailing Natal, pelaku UMK masih lebih percaya pada transaksi tunai dan pasar tradisional. Kebiasaan ini memperlambat transisi ke transaksi digital meskipun sudah tersedia fasilitas.

f. Keberlanjutan program. Sebagian besar pelatihan hanya bersifat jangka pendek. Studi kasus di Binjai menunjukkan bahwa setelah pelatihan selesai, tidak ada tindak lanjut, sehingga UMK kembali pada pola usaha lama.[25]

Sintesis dan Implikasi

Analisis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kombinasi faktor pendukung dan bagaimana hambatan ditangani. Dukungan politik, kerja sama lintas sektor, dan antusiasme pelaku usaha dapat menjadi katalis penting. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, literasi digital yang cukup, dan dukungan berkelanjutan, program berisiko hanya menghasilkan capaian jangka pendek. Implikasinya, strategi ke depan harus berfokus pada diferensiasi wilayah, peningkatan kualitas pendamping, serta penyediaan insentif agar UMK terus aktif di ekosistem digital.[26]

CONCLUSION

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program yang dirancang memiliki standar dan sasaran yang cukup jelas. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama karena adanya keberagaman tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMK. Faktor-faktor lain yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana, serta variasi kapasitas yang dimiliki oleh para pelaksana program. Meskipun dihadapkan pada kendala-kendala tersebut, implementasi program ini juga didukung oleh beberapa faktor positif, seperti dukungan pemerintah daerah, kolaborasi yang baik dengan mitra eksternal, dan motivasi tinggi dari para pelaksana. Kendati demikian, program ini masih harus mengatasi isu-isu seperti pendampingan yang belum merata, adanya program yang terputus atau tidak berkelanjutan, dan kurangnya akses terhadap informasi pasar bagi pelaku UMK.

REFERENCES

Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan Publik. Alfabeta

[25] Suryana, Y. (2009). Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses. Kencana Prenada Media Group.
[26] Wicaksono, F. X. (2006). Analisis kebijakan publik. Graha Ilmu.
Nugroho, R. (2004). Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.
[26] Suhendra. (2006). Manajemen pemberdayaan masyarakat. LP3ES.

Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Sage Publications.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Eko, S. (2004). Pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. LKiS.

Poerwadarminta, W. J. S. (1984). Kamus umum bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

Hanifah Harsono. (2002). Implementasi kebijakan dan politik. LIPI Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? Field Methods, 18(1), 59–82.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd ed.). SAGE.

Nugroho, R. (2004). Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.

ANTARA Sumut. (2025, 27 Februari). 20 persen pelaku UMKM di Sumut sudah gunakan transaksi digital.

S Asian Development Bank (ADB). (2024). Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2024.

Tenggara Strategics. (2024). Tinjauan Strategis Logistik Darat di Indonesia.

Bardach, E. (1977). The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law. MIT Press.

Dunn, W. N. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice-Hall.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press.

Elmore, R. F. (1979/1980). Backward Mapping: Implementation Research and Policy Decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601–616.

Lipsky, M. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. Russell Sage Foundation.

Wahab, S. A. (2006). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara.

Suryana, Y. (2009). Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses. Kencana Prenada Media Group.

Wicaksono, F. X. (2006). Analisis kebijakan publik. Graha Ilmu.

Nugroho, R. (2004). Public policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.

Suhendra. (2006). Manajemen pemberdayaan masyarakat. LP3ES.

Nugroho, Riant. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Wasistiono, Sadu, dan Irwan Tahir. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Fuadi, Debi S., Ade Sadikin Akhyadi, dan Iip Saripah. "Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial." Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 5, No. 1 (2021): 1–14.

Handayani, Amelia Dwi. "Digitalisasi UMKM: Peningkatan Kapasitas melalui Program Literasi Digital." Jurnal Signal. Vol. 11, No. 1 (2023): 1–15.

Saputri, Nabila, dan Muhammad Eko Atmojo. "Implementasi Program Digitalisasi UMKM melalui Rumah BUMN Yogyakarta." Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol. 10, No. 1 (2024): 68–84.